

Literature Review: Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Yety Anggraini¹, Wahyu Wismawati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, STIE Wijaya Mulya Surakarta

¹Email: yetyanggraini@gmail.com

²Email: wahyuwismawati2@gmail.com

Received: April 14, 2025

Revised: July 14, 2025

Accepted: June 10, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 25 artikel nasional dan internasional yang relevan, dengan sintesis mendalam pada enam studi utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak bersifat tidak linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tata kelola perusahaan, etika bisnis, dan konteks kelembagaan negara. Di negara berkembang, perusahaan keluarga cenderung lebih agresif dalam menghindari pajak akibat lemahnya pengawasan dan regulasi fiskal. Sebaliknya, di negara maju, kepemilikan keluarga justru dapat menekan praktik penghindaran pajak karena orientasi jangka panjang dan tekanan reputasi. Penelitian ini juga menemukan variasi yang signifikan dalam metode pengukuran *tax avoidance*, seperti GAAP ETR, *Cash ETR*, *BTD*, dan *Long Run ETR*, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Studi ini menegaskan perlunya pendekatan multi teoritis dan longitudinal dalam menganalisis dinamika fiskal perusahaan keluarga serta pentingnya integrasi faktor struktural dan institusional dalam menilai perilaku perpajakan korporasi. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori tata kelola dan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan fiskal yang lebih adil dan kontekstual.

Kata Kunci: Kepemilikan Keluarga; Penghindaran Pajak; Tata Kelola Perusahaan, Etika Bisnis, SLR

Literature Review: The Influence of Family Ownership on Tax Avoidance

Abstract

This study aims to systematically review the relationship between family ownership and tax avoidance by applying a Systematic Literature Review (SLR) method on 25 relevant national and international articles, with an in depth synthesis of six core studies. The findings reveal that the impact of family ownership on tax avoidance is nonlinear and highly dependent on contextual factors such as corporate governance, business ethics, and institutional environment. In developing countries, family firms tend to engage more aggressively in tax avoidance due to weak regulatory oversight and governance structures. Conversely, in developed countries, family ownership often reduces tax avoidance practices, driven by long term orientation and reputational concerns. This review also highlights the diversity of tax avoidance measurement methods used in the literature, including GAAP ETR, Cash ETR, Book Tax Differences (BTD), and Long Run ETR, each with distinct strengths and limitations. The study emphasizes the importance of employing multi-theoretical frameworks and longitudinal approaches to better understand the fiscal behavior of family firms. The findings are expected to contribute to the development of corporate governance theory and offer valuable insights for policymakers in designing more effective and context sensitive tax regulations.

Keywords: *Family Ownership, Tax Avoidance, Corporate Governance, Business Ethics, Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Struktur kepemilikan merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis di perusahaan, termasuk keputusan dalam strategi pengelolaan pajak (Chen et al., 2010). Salah satu bentuk struktur yang dominan di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Asia dan Eropa ialah kepemilikan keluarga. Karakteristik utama dari perusahaan keluarga yaitu adanya pengaruh yang cukup besar keterlibatan langsung pemilik terhadap keputusan manajerial dan operasional perusahaan serta adanya tujuan non finansial, misal menjaga reputasi antar generasi dan keberlanjutan bisnis lintas generasi (Gómez-Mejía et al., 2007). Karakteristik ini menimbulkan berbagai pertanyaan kritis terkait apakah kepemilikan keluarga dapat meningkatkan atau justru menekan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga, dalam konteks pengelolaan pajak, peran kepemilikan keluarga masih menjadi perdebatan yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Fenomena praktik penghindaran pajak juga masih menjadi isu yang semakin kompleks mendapat perhatian lebih dalam dunia ekonomi, bisnis, kebijakan publik maupun akademik (Desai & Dharmapala, 2006). Hal ini dikarenakan karena dampaknya terhadap penerimaan negara dan keadilan fiskal. Seperti yang kita tahu saat ini, bahwa penerimaan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak Orang Pribadi maupun Badan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi perusahaan yang sifatnya legal untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010). Namun, dalam praktiknya sering kali dapat menimbulkan dilema etika serta memperlihatkan adanya celah dalam sistem perpajakan untuk bisa dihindari. Dalam hal ini, konteks struktur kepemilikan perusahaan memainkan peranan penting untuk bisa menentukan sejauh mana pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang beresiko atau justru oportunistik terkait kewajibannya dalam perpajakan (Chen et al., 2010).

Perusahaan keluarga cenderung memiliki karakteristik yang cukup unik, misal adanya konsentrasi kepemilikan, orientasi jangka panjang, dan juga keterlibatan langsung pemilik perusahaan. Kecenderungan ini mempengaruhi sisi positif dan negatif perusahaan terkait perilakunya dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Kim & Zhang, 2016). Di sisi lain, adanya keterlibatan keluarga bisa meningkatkan pengawasan dalam perusahaan dan juga menurunkan insentif untuk melakukan praktik pajak yang sifatnya agresif. Dikarenakan perusahaan milik keluarga memungkinkan untuk menghindari risiko hukum terkait pajak dan juga reputasi yang ditimbulkan dari penghindaran pajak. Hal ini juga berkaitan dengan adanya kepentingan menjaga nama baik keluarga. Namun, untuk mengupayakan efisiensi keuangan perusahaan, banyak perusahaan yang justru mendorong praktik penghindaran pajak demi mempertahankan kekayaan keluarga (Saleh & Talkhan, 2024). Hal ini dapat dilakukan ketika pengawasan eksternal dan tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan efektif.



Gambar 1. Tren Penelitian Perusahaan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Grafik tren tersebut menunjukkan tren publikasi jurnal nasional maupun internasional terkait analisis tentang perusahaan keluarga dan penghindaran pajak dari tahun 2010 hingga 2024.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2024 yang mencerminkan relevansi topik ini di tengah dinamika reformasi perpajakan dan tuntutan transparansi perusahaan. Mayoritas literatur publikasi nasional menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga mendorong terjadinya *tax avoidance*, terutama apabila tidak ada pengawasan eksternal yang memadai di perusahaan, seperti audit dan komisar independen. Selanjutnya, penelitian internasional hasilnya lebih bervariasi, tergantung pada konteks budaya dan institusi di masing-masing negara. Di negara dengan regulasi/aturan pajak yang kuat, kepemilikan keluarga cenderung mengurangi praktik penghindaran perpajakan (Desai & Dharmapala, 2006).

Beberapa studi literatur penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pajak khususnya perusahaan keluarga akan cenderung memilih berhati-hati karena alasan orientasi jangka panjang dan juga keinginan dalam menjaga reputasi lintas generasi. Penelitian Chen et al. (2010) menunjukkan adanya korelasi negatif antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak. Penelitian tersebut mengambil data di perusahaan Taiwan dalam kisaran tahun 1996 – 2000 dengan sampel 1.003 perusahaan. Hasilnya, mencerminkan preferensi perusahaan untuk dapat menghindari resiko hukum dan mempertahankan reputasi perusahaan. Lebih lanjut, penelitian Desai dan Dharmapala (2006) dengan sampel perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung akan mengurangi penghindaran pajak karena kepemilikan keluarga akan mendorong sikap konservatisme untuk melindungi reputasi perusahaan. Pemusatan kepemilikan dan pengawasan yang lemah secara eksternal dapat meningkatkan insentif yang lebih agresif untuk menghindari praktik pajak terutama yang terjadi di negara-negara dengan tingkat *enforcement* yang rendah (Desai & Dharmapala, 2006). Sebaliknya, temuan dari penelitian Saleh & Talkhan (2024) menunjukkan bahwa *family ownership* berkontribusi signifikan dalam meningkatkan penghindaran pajak di perusahaan Mesir. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widiastutik et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dapat meningkatkan *tax avoidance*, meskipun ESG *disclosure* dapat memoderasi efeknya.

Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak sifatnya kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, kajian studi literatur penelitian ini dimaksudkan untuk mensintesis hasil temuan-temuan dari berbagai publikasi nasional dan internasional dalam membahas topik ini. *Literature review* ini juga tujuannya untuk mengkaji berbagai temuan serta menganalisis hasil temuan empiris terkait pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Melalui identifikasi dan analisis pola umum penelitian dari berbagai literatur dan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tata kelola perusahaan terutama yang berkaitan dengan struktur kepemilikan khususnya kepemilikan keluarga. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dan regulator khususnya dalam merancang kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan agar kedepannya lebih efektif dan adil serta memberikan pemahaman yang lebih holistik terkait dinamika yang terjadi antara tata kelola internal perusahaan dengan tingkat kepatuhan pajak perusahaan (Khelil & Khlif, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak? Apa saja faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut? Apakah terdapat kesenjangan hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan antara negara maju dan berkembang? Selain itu, bagaimana metode pengukuran *tax avoidance* mempengaruhi kecenderungan perusahaan keluarga dalam melakukan tindakan penghindaran pajak?

TEORI

Berikut beberapa teori untuk dapat dijadikan landasan dalam memahami kajian literatur terkait pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory merupakan teori yang menjelaskan terkait adanya konflik (*agency conflict*) antara pemilik/prinsipal perusahaan dengan manajer/agen. Konflik keagenan dalam perusahaan keluarga antara pemilik dan manajer cenderung rendah. Hal ini dikarenakan pemilik perusahaan dapat berperan sebagai pemilik sekaligus sebagai manajer perusahaan. Namun, masalah akan muncul apabila agen memiliki kepentingan pribadi yang berlawanan dengan pemilik perusahaan, yang bisa jadi menimbulkan adanya *agency conflict*. Biasanya perusahaan publik kepemilikannya tersebar, sehingga akan sulit dilakukan pengawasan oleh manajer. Berbeda halnya dengan perusahaan keluarga yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi, dimana konflik *agency* tipe I antara manajer dan pemilik sering dianggap menurun. Aplikasi teori keagenan dalam studi literatur penelitian ini terbagi dalam 2 sudut pandang yang berbeda. Pertama, *agency cost* tipe I, dimana implikasi kepemilikan keluarga di suatu perusahaan akan menurunkan motivasi dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Chen et al., 2010). Hal ini terjadi karena pemilik seringkali menjadi pengelola juga. Mereka menginginkan reputasi perusahaan untuk kepentingan jangka panjang dan juga keinginan dalam menjaga keberlanjutan perusahaan serta adanya keterlibatan emosional yang kuat dan warisan keluarga untuk mempertahankan prospek perusahaan. Kedua, *agency cost* tipe II, implikasinya bahwa kepemilikan keluarga akan meningkatkan praktik penghindaran pajak (Gaaya et al., 2017; Kim & Zhang, 2016). Ketika tidak 100% saham dimiliki oleh dominasi keluarga, maka akan muncul potensi adanya konflik antara pemilik keluarga dan pemegang saham minoritas. Hal ini bisa menjadi celah keluarga untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar serta dapat menyembunyikan atau mentransfer kekayaan perusahaan agar tidak terdeteksi pengawasan oleh publik. Secara integratif, kesimpulannya bahwa *agency theory* menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* bergantung pada beberapa hal, diantaranya pada posisi keluarga dalam manajemen perusahaan, tingkat akuntabilitas eksternal, serta pada struktur kepemilikan.

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* menyatakan bahwa agen/manajer bertindak sesuai dengan integritasnya dan tidak terdorong oleh kepentingan pribadi yang berlawanan dengan pemilik. Agen bukan hanya mengejar keuntungan pribadi, namun bisa menjadi "*steward*" atau dalam hal ini sebagai penjaga aset serta kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam *family firm*, aplikasi teori *stewardship* menunjukkan bahwa pemilik keluarga sering kali menjadi manajer aktif di perusahaan. Hal ini memungkinkan adanya pengaruh yang cukup besar terkait dengan keputusan-keputusan strategis perusahaan. Orientasi keluarga dilihat dari sebesar besar keterlibatan emosional dan identitasnya terhadap perusahaan dalam menjaga reputasi lintas generasi serta lebih peduli akan kesinambungan bisnisnya. Sehingga, perusahaan keluarga akan lebih menghindari tindakan yang dapat merusak citra, termasuk tindakan penghindaran pajak yang agresif. Keluarga semata-mata bukan hanya menginginkan profitabilitas jangka pendek, namun juga berpegang teguh pada nilai-nilai yang sudah dianutnya seperti komitmen, kepercayaan, dan kontinuitas. Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini, bahwa kepemilikan keluarga cenderung akan menurunkan praktik penghindaran pajak.

Dikarenakan keluarga lebih mengutamakan adanya *going concern*, reputasi yang baik, serta menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan maupun regulasi sebagai bentuk tanggung jawab (*responsibility*) sosial perusahaan. Penelitian Chen et al. (2010) menemukan bahwa *family firm* akan lebih konservatif dalam pengelolaan dan strategi pajaknya dikarenakan tindakan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap reputasi maupun warisan keluarga. Khelil & Khlif (2023) juga mengkaji bahwa perusahaan keluarga sesuai dengan nilai-nilai *stewardship* cenderung mendorong untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama apabila didukung oleh sistem tata kelola internal perusahaan yang cukup kuat.

Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

Kepemilikan keluarga merujuk pada kondisi dimana terdapat satu atau beberapa anggota keluarga yang berperan aktif dan memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan strategis perusahaan.

Kebanyakan anggota perusahaan keluarga dari pendiri perusahaan menduduki posisi penting dalam manajemen puncak, dewan, maupun sebagai *blockholders* perusahaan. Di Indonesia, persentase 10% kepemilikan saham dianggap efektif dalam melakukan pengendalian perusahaan. Hal ini dijelaskan pula dalam PSAK 15 yang menyatakan bahwa kepemilikan saham $\leq 20\%$ punya pengaruh dalam pengendalian perusahaan. Bisnis keluarga biasanya memiliki keseimbangan dan juga keselarasan dalam pengelolaan perusahaan yang cukup kuat untuk jangka panjang. Namun, sisi negatif perusahaan keluarga ialah munculnya tindakan nepotisme apabila keluarga salah menempatkan anggotanya yang kurang kompeten dalam bisnis. Dampaknya, pada penciptaan nilai perusahaan akan mengalami penurunan dengan adanya anggota yang kurang berkualifikasi dalam manajemen perusahaan. Efek lainnya juga akan menyebabkan *opportunistic behavior*, dimana kurangnya pengawasan dari pemegang saham minoritas memungkinkan keluarga melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kekayaan keluarga. Penelitian Mangoting et al. (2022) dan Richardson et al. (2016) menunjukkan hasil bahwa perusahaan cenderung lebih agresif dalam praktik pajak, terutama di negara berkembang yang pengawasannya lemah. Sisi positif perusahaan keluarga yaitu terdapat korelasi yang baik untuk lebih patuh pada regulasi pajak. Perusahaan akan lebih menjaga nama baik lintas generasinya dan reputasi serta keuntungan jangka panjangnya. Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa adanya sikap yang lebih konservatif dari perusahaan keluarga yang berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak pada konteks regulasi pasar yang ketat. Sehingga, variabel kepemilikan keluarga cukup penting dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan dan strategi pengelolaan pajak. Lebih lanjut, dampaknya akan bersifat kontekstual dan juga teoritis terhadap penghindaran pajak apakah hasilnya lebih ditinjau dari sisi oportunistik (*agency theory*) atau dari sisi *stewardship (going concern)* perusahaan.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu bentuk tindakan atau strategi perusahaan dalam pengelolaan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah hukum (*loopholes*) yang masih dalam batas legal atau melalui pengaturan struktur keuangan tertentu serta insentif pajak. Namun, praktik ini dianggap tidak etis dan bertentangan dengan semangat undang-undang perpajakan karena dapat mengurangi kontribusi fiskal perusahaan terhadap negara. Dampaknya, penerimaan negara akan cenderung menurun. Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan bahwa *Tax avoidance is the reduction of tax liability through legal arrangements that are within the law but possibly against its spirit*. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *tax avoidance* sebagai aktivitas atau strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, baik yang sifatnya agresif ataupun tidak, selama masih kategori legal. Motivasi utama praktik penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan diantaranya untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dari sisi investor, likuiditas terjaga terutama apabila ekonomi perusahaan tidak stabil, serta meningkatkan laba perusahaan. Namun, beberapa strategi tersebut justru menimbulkan risiko reputasi perusahaan dan juga adanya ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan. Hal ini akan berdampak pada perhatian yang lebih dari otoritas pajak. Indikator ukuran *tax avoidance* dari beberapa literatur penelitian ada berbagai jenis metrik yang umum digunakan, diantaranya :

1. *Cash ETR (Effective Tax Rate)*: Dihitung berdasarkan pajak yang dibayar secara tunai dibagi dengan laba sebelum pajak, yang mencerminkan *tax planning* berbasis kas aktual perusahaan.
2. *GAAP ETR*: Rasio beban pajak berdasarkan laporan keuangan dengan laba akuntansi sebelum pajak. Semakin rendah ETR, maka semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
3. *BTD (Book Tax Difference)*: Selisih laba akuntansi dengan laba kena pajak (laba fiskal). Apabila selisihnya cukup besar, menunjukkan *tax avoidance* cukup agresif.
4. *Discretionary BTD*: selisih laba akuntansi dan laba fiskal akibat dari keputusan manajerial perusahaan (*discretionary accruals*).

5. *Long Run ETR*: Dihitung dari rata-rata ETR selama periode beberapa tahun (misal 5 s.d. 10 tahun) yang mencerminkan gambaran perusahaan di masa mendatang melalui kewajiban pajaknya.

Kesimpulan dari beberapa pengukuran tersebut, bahwa *tax avoidance* akan semakin tinggi apabila ETR semakin rendah angkanya atau ketika *BTD* semakin besar nilainya.

Hubungan antara Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Secara umum, hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak cenderung kontradiktif antara positif dan negatif, tergantung motif perusahaan. Hubungan yang berkorelasi positif disebabkan adanya kontrol perusahaan keluarga yang lebih dominan untuk melakukan strategi pengelolaan pajak yang agresif guna memaksimalkan laba perusahaan (Gaaya et al., 2017). Pengawasan yang tinggi dari pemilik dan minimnya pengawasan eksternal memungkinkan untuk memanfaatkan celah regulasi pajak yang ketat. Adanya asimetri informasi dengan pemegang saham minoritas atau publik juga dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak yang cukup leluasa dilakukan perusahaan keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi perlindungan terhadap aset perusahaan jangka panjang. Di sisi lain, penelitian Chen et al. (2010) justru mendapati sikap dari perusahaan keluarga yang lebih konservatif dalam mengelola pajak. Korelasi negatif hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak disebabkan karena keluarga lebih mementingkan reputasi lintas generasi dan kesinambungan bisnis untuk jangka panjang. Perusahaan keluarga cenderung tidak mau mengambil resiko hukum yang lebih tinggi akibat penghindaran pajak yang agresif. Terdapat beberapa faktor mengapa hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak sifatnya universal atau tidak bersifat linier, hal ini karena dipengaruhi oleh faktor moderasi yang lebih struktural. Salah satunya menurut Minnick dan Noga (2010) ialah *corporate governance* atau kualitas tata kelola perusahaan (komite audit, auditor eksternal, dan komisaris independen). Selain itu, faktor institusional juga berpengaruh, dimana perusahaan keluarga di negara berkembang yang aturan pajak nya lebih lemah akan berpengaruh lebih kuat terhadap penghindaran pajak (Khelil & Khelif, 2023).

Dari sisi motif *socioemotional wealth* justru menilai bahwa preferensi yang kuat terhadap nilai-nilai keluarga yang sifatnya non ekonomi akan membatasi tindakan pajak yang lebih agresif (Gómez-Mejía et al., 2007). Penelitian Khelil dan Khelif (2023) mensintesis hasil penelitian terdahulu dengan studi lebih dari 20 artikel empiris yang menyatakan bahwa terdapat temuan hubungan yang ambivalen antara kepemilikan keluarga dan *tax avoidance*. Sebagian besar hasil studi menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan keluarga untuk menjaga stabilitas bisnis antar generasi. Banyak negara berkembang yang regulasi pengawasan pajak nya lemah cenderung lebih agresif menghindari pajak. Selain itu, di negara-negara yang tata kelola perusahaannya lemah cenderung lebih bebas melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif. Tindakan ini juga dipengaruhi faktor kelembagaan yang cukup kuat, misal budaya tata kelola perusahaan, kualitas audit, efektivitas pengawasan pajak, dan independensi dewan. Peran mekanisme tata kelola perusahaan juga menekan tindakan *tax avoidance* yang lebih agresif.

Perusahaan keluarga memegang peranan strategis dalam dinamika penghindaran pajak karena struktur kepemilikan yang unik menciptakan dualitas dalam perilaku manajerial dan tata kelola. Berdasarkan *agency theory*, ketika kontrol keluarga tidak sepenuhnya dominan, misalnya dalam kondisi pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan maka *agency cost* tipe II berpotensi meningkat, yang memicu tindakan oportunistik seperti *tax avoidance* untuk memaksimalkan manfaat pribadi pemilik mayoritas, terutama jika tidak diimbangi dengan pengawasan eksternal yang efektif (Gaaya et al., 2017; Khelil dan Khelif, 2023). Sebaliknya, *stewardship theory* menyebutkan bahwa perusahaan keluarga yang memiliki kendali penuh cenderung lebih hati-hati dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga kurang terdorong untuk menghindari pajak karena pertimbangan reputasi, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan bisnis (Khelil dan Khelif, 2023). Tren publikasi akademik menunjukkan lonjakan studi tentang topik ini di tahun 2024, mencerminkan meningkatnya perhatian global terhadap praktik pajak perusahaan keluarga. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya,

praktik *tax avoidance* oleh perusahaan keluarga masih tinggi karena lemahnya pengawasan. Namun, di negara dengan sistem regulasi pajak yang kuat, efeknya justru sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman atas konteks institusional, kualitas audit, dan struktur kepemilikan menjadi krusial dalam menjelaskan keragaman perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan keluarga lintas yurisdiksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *systematic literature review* (SLR). Penggunaan metode ini bertujuan untuk menganalisa dan menyusun secara menyeluruh serta sistematis berbagai hasil penelitian terdahulu. Sritharan et al. (2022) menyebutkan SLR merupakan proses pengumpulan data, pengevaluasian, serta pengintegrasian bukti-bukti yang terkait dengan fenomena dan topik penelitian. Penggunaan SLR dianggap sebagai metode terbaik untuk pengumpulan berbagai data penelitian dengan waktu yang singkat yang dapat dianalisa secara objektif oleh peneliti (Meilanda et al., 2024). Analisa SLR dalam penelitian ini meliputi tahapan pencarian jurnal berdasarkan topik yang relevan dengan judul berdasarkan tahun penelitian, identifikasi dan pengelompokkan pola hubungan variabel kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak, klasifikasi hasil penelitian, serta menemukan *research gap* sesuai dengan data yang sudah dibandingkan. Pencarian jurnal sebagai literatur penelitian diambil dari database berbagai artikel yang terindeks nasional (Sinta) dan internasional (Web of Science, ScienceDirect, Emerald) dengan kata kunci misal: “*family ownership*”, “*tax avoidance*”, “*corporate governance*” antara tahun 2010-2024. Setiap penelitian diidentifikasi arah hubungan berdasarkan judul penelitian, negara penelitian, teori yang digunakan, metodologi penelitian serta variabel lain yang mempengaruhi hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Selanjutnya, diambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dasar keagenan maupun *stewardship* dan dievaluasi *gap* penelitian. Dari hasil pencarian di dapat temuan 25 artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Untuk lebih memudahkan analisa, dari ke 25 artikel tersebut peneliti mensintesis 6 artikel paling relevan dengan fenomena penelitian.

Tabel 1. Hasil penelitian terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Negara	Hasil Penelitian
1.	Chen et al. (2010)	<i>Are family firms more tax aggressive than non-family firms ?</i>	Taiwan	Perusahaan keluarga di negara Taiwan cenderung berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dibanding perusahaan non keluarga. Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran Pajak.
2.	Gaaya et al. (2017)	<i>Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The role of CEO multiple directorships</i>	Tunisia	Hasil lain menunjukkan, variabel kualitas Audit memperlemah hubungan positif perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak.
3.	Kim & Zhang (2016)	<i>Family firms and tax avoidance</i>	Amerika Serikat	Secara umum, perusahaan keluarga di AS berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Kepemilikan keluarga belum tentu menghasilkan tindakan penghindaran pajak yang lebih rendah ataupun tinggi, karena tergantung pada mekanisme <i>corporate governance</i> . Apabila tata kelola lemah, perusahaan keluarga di AS cenderung memanfaatkan celah untuk menghindari pajak.
4.	Minnick & Noga (2010)	<i>Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management ?</i>	AS & internasional	

5.	Saleh & Talkhan (2024)	<i>Ownership Structure and Tax Avoidance in Egyptian Firms</i>	Mesir	Struktur kepemilikan keluarga di perusahaan Mesir cenderung berkorelasi positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Alasan utamanya yaitu karena lemahnya pengawasan eksternal dan lemahnya peran tata kelola perusahaan. Hasilnya campuran, dimana tanpa adanya etika bisnis yang cukup kuat di perusahaan, kepemilikan keluarga akan berkorelasi positif terhadap penghindaran pajak, dan sebaliknya.
6.	Nanda & Rosid (2024)	<i>The Relationship between Family Ownership and Tax Avoidance: The Moderating Role of Business Ethics</i>	Indonesia	

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berdasarkan pengumpulan literatur penelitian terdahulu terbagi menjadi beberapa bagian evaluasi, terutama yang terkait dengan 6 sintesa penelitian. Teknik sintesa artikel sesuai dengan yang sudah diuraikan dalam metode penelitian, dimana penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang dijadikan pembahasan dalam literature review ini. Dengan menggunakan metode *systematic literature review* (SLR), berikut beberapa hasil deskriptif analisis penelitian.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil sintesa menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak sifatnya tidak seragam. Artinya, masing-masing penelitian baik nasional maupun internasional memiliki 3 pola pengaruh utama, diantaranya pengaruh positif, negatif, dan bersyarat. Pengaruh bersyarat menunjukkan adanya faktor moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. Sedangkan, untuk pengaruh positif artinya pengaruh yang cukup kuat untuk mendorong tindakan penghindaran pajak. Pengaruh negatif berarti menurunkan atau menekan agar tidak terjadi penghindaran pajak terutama di perusahaan keluarga. Implikasi pengaruh positif dan negatif dapat berasal dari negara dimana data penelitian terdahulu dipakai. Pengaruh positif banyak terjadi di negara berkembang, dimana keberadaan *family ownership* menjadi sarana yang cukup kuat untuk memaksimalkan kekayaan keluarga melalui tindakan *tax avoidance*. Korelasi positif dari hasil penelitian Gaaya et al. (2017) terjadi karena perusahaan di Tunisia kebanyakan CEO memegang jabatan yang cukup banyak (*multiple directorships*).

Multiple directorships merupakan kondisi individu dalam hal ini CEO atau dewan direksi yang menjabat sebagai direksi juga di lebih dari 1 perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya risiko konflik internal, terbatasnya fokus dan waktu dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan, serta memudahkan koordinasi tindakan yang agresif dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Sehingga, terdapat potensi kecenderungan untuk menghindari pajak. Saleh & Talkhan (2024) yang menggunakan data perusahaan di negara Mesir juga menemukan kecenderungan perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan Gaaya et al. (2017), penelitian Saleh & Talkhan (2024) justru didominasi pengaruh dari tata kelola perusahaan yang lemah. Kurangnya kontrol dan akuntabilitas dari perusahaan keluarga mengakibatkan kecenderungan untuk lebih leluasa memanfaatkan celah regulasi pajak demi keuntungan pribadi. Pengaruh negatif ditunjukkan oleh penelitian Chen et al. (2010) dan Kim & Zhang (2016), dimana kepemilikan keluarga cenderung mengurangi tindakan penghindaran pajak yang lebih agresif. Secara umum, perusahaan keluarga di Amerika Serikat cenderung menghindari celah aturan pajak terutama ketika dikelola oleh pendiri (*founder led*). Di negara yang sistem hukumnya kuat, kebanyakan perusahaan keluarga lebih patuh untuk membayar pajak dibandingkan harus menghadapi proses hukum.

Faktor-Faktor Moderasi Hubungan *Family Ownership* dan *Tax Avoidance*

Pengaruh moderasi, baik yang memperlemah atau memperkuat hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak ditunjukkan oleh beberapa peneliti terdahulu, misal etika bisnis (Nanda & Rosid, 2024), mekanisme *corporate governance* (Minnick & Noga, 2010), *multiple directorships* dan kualitas audit eksternal (Gaaya et al., 2017). Faktor beberapa moderator ini menjadi penentu hasil penelitian apakah kepemilikan keluarga memperkuat atau justru memperlemah praktik penghindaran pajak. Nanda & Rosid (2024) menyatakan bahwa terdapat hasil campuran terkait konteks moderasi etika bisnis dalam hubungannya dengan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Apabila etika bisnis di perusahaan keluarga cukup kuat, maka praktik penghindaran pajak bisa ditekan. Sedangkan, jika etika perusahaan lemah, maka *family firm* akan lebih agresif. Penelitian Minnick & Noga (2010) menunjukkan bahwa secara langsung hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak hasilnya tidak signifikan. Hal ini karena terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu mekanisme *corporate governance*. Jika tata kelola perusahaan keluarga kuat, maka tindakan penghindaran pajak dapat diturunkan. Apabila tata kelolanya lemah, memungkinkan adanya peluang untuk melakukan penghindaran pajak yang cukup tinggi. Hasil lain ditunjukkan oleh penelitian Gaaya et al. (2017), dimana hubungan *family ownership* dipengaruhi adanya faktor moderasi *multiple directorships* CEO dan kualitas audit eksternal. Adanya rangkap jabatan atau *multiple directorship* dapat meningkatkan peluang *tax avoidance*. Sedangkan, adanya audit eksternal yang kuat di perusahaan keluarga dapat melemahkan tindakan penghindaran pajak. Pada dasarnya hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak tidak bisa berdiri sendiri, namun ada ketergantungan pada faktor lain, misal: sistem tata kelola yang kuat, pengawasan eksternal perusahaan, dan etika perusahaan keluarga.

Pengidentifikasian *Research Gap*

Kesenjangan penelitian (*Research Gap*) bisa berasal dari banyak hal, misal kesenjangan hasil penelitian (pengaruh positif atau negatif), jenis pengukuran *tax avoidance*, negara penelitian, faktor pengaruh tambahan, pendekatan teoritis yang dipakai, dsb. Secara komprehensif, berikut beberapa *gap* penelitian dari 6 literatur yang di sintesa :

1. *Gap* teoritis: Keterbatasan perspektif teoritis dan inkonsistensi hasil empiris

Studi terdahulu sebagian besar melibatkan *agency theory* dan *stewardship theory* secara terpisah untuk mengidentifikasi tindakan fiskal perusahaan keluarga. Kedua pendekatan tersebut secara konteks dalam pengambilan keputusan fiskal perusahaan keluarga belum menjelaskan sepenuhnya dinamika yang terjadi di perusahaan khususnya apabila dihadapkan pada nilai-nilai etika, orientasi generasional, dan tekanan reputasi. *Agency theory* menilai bahwa perusahaan keluarga cenderung oportunistik apabila tidak ada pengawasan kinerjanya (Gaaya et al., 2017). Sedangkan, *stewardship theory* menilai bahwa perusahaan keluarga lebih memiliki tanggung jawab secara sosial (Kim & Zhang, 2016). Adanya 2 keterbatasan teori tersebut, memicu Nanda & Rosid (2024) melakukan riset dan hasilnya muncul variabel etika sebagai faktor kultural dalam kerangka teoritis yang belum banyak diintegrasikan peneliti-peneliti lain. Kesenjangan konseptual dalam literatur ini memunculkan dan menjembatani penggunaan pendekatan *multi theoretical frameworks* yang lebih kontekstual dengan menggabungkan misal teori legitimasi, teori nilai institusional, dan nilai sosial perusahaan.

Inkonsistensi hasil empiris hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak ditunjukkan oleh beberapa literatur. Sebagian besar literatur dari negara maju seperti Chen et al. (2010) dan Kim & Zhang (2016) menunjukkan kecenderungan tingkat penghindaran pajaknya rendah yang dilakukan oleh perusahaan keluarga. Sebaliknya, di negara berkembang yang dilakukan oleh penelitian Gaaya et al. (2017) dan Saleh & Talkhan (2024) menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif dalam penghindaran pajak, karena tingginya kekuasaan pemilik perusahaan yang terkonsentrasi. Rosid & Nanda (2024) menemukan hasil bahwa hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak diperkuat dengan adanya tingkat etika bisnis yang dianut perusahaan. Inkonsistensi hasil empiris tersebut mengindikasikan bahwa hubungan

kepemilikan pajak dan penghindaran pajak tidak bersifat universal, melainkan sangat tergantung kondisi yang kontekstual. Sehingga, muncul *gap* empiris yang perlu diatasi dengan pendekatan multivariat yang menjelaskan dinamika strategi perusahaan keluarga secara holistik dalam konteks pajak dan juga lintas negara.

2. *Gap metodologi*: Variasi pendekatan dan keterbatasan metodologi pengukuran

Secara metodologi dan pengukuran penghindaran pajak, mayoritas penelitian menggunakan studi yang sifatnya *cross sectional*. Hal ini menjadi hambatan karena strategi *tax avoidance* sifatnya jangka panjang dan dinamis. Sehingga, perlu adanya studi longitudinal atau *multi level analysis* untuk memahami secara menyeluruh perilaku fiskal perusahaan. Beberapa literatur menunjukkan variasi yang tinggi dalam pengukuran *tax avoidance*, misal GAAP ETR, *Cash ETR*, *BTD*, sampai dengan model indeks seperti *Tax Shelter Score*. Kim & Zhang (2016) menggunakan pengukuran indeks *tax shelter* yang cukup kompleks, sehingga mampu menelaah tindakan pajak yang agresif secara tersembunyi. Chen et al. (2010) dalam studinya masih bersifat terbatas pada pendekatan rasio tahunan yang digunakan, dengan menggunakan pengukuran GAAP ETR dan *BTD*. Sedangkan, Nanda & Rosid (2024) memperkenalkan pendekatan moderasi variabel etika dengan menggunakan formula regresi yang jarang dilakukan sebelumnya. Secara menyeluruh, belum terdapat konsistensi dalam pendekatan metodologi dan pengukuran serta belum maksimal dalam mengungkap praktik penghindaran pajak, baik lintas struktur kepemilikan maupun lintas waktu. Sehingga diperlukan teknik analisis lanjutan dan pengukuran yang terintegrasi dalam tindakan penghindaran pajak di perusahaan keluarga.

3. *Gap kontekstual*: Literatur Nasional dan Komparasi Global

Sebagian besar analisa literatur berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Taiwan, serta negara berkembang yang berada di wilayah kawasan Timur Tengah seperti Mesir dan Tunisia. Sedangkan literatur nasional berasal dari negara Indonesia, yang juga termasuk negara berkembang. Di Indonesia, literatur terkait perusahaan keluarga jumlahnya masih terbatas baik dari sisi teoritis maupun metodologis, serta pendekatannya masih bersifat eksploratif bukan teoritis komprehensif. Nanda & Rosid (2024) salah satu bagian dari sedikitnya penelitian yang menelaah secara mendalam terkait dinamika yang terjadi dalam perusahaan keluarga terkait konteks hukum maupun budaya lokalnya. Di sisi lain, masih belum banyak penelitian yang melakukan perbandingan atau komparasi antar negara melalui pendekatan serta data yang seragam. Sehingga, kondisi ini menyulitkan adanya pembentukan generalisasi yang faktual dan valid secara internasional karena kurangnya literatur domestik dengan basis data longitudinal. Selain itu, banyak penelitian masih terkonsentrasi di kawasan negara maju atau wilayah tertentu, belum banyak peneliti yang melakukan riset di wilayah Asia Tenggara, Amerika Latin atau Afrika. Kesenjangan ini dapat dimanfaatkan untuk studi lanjut yang berkaitan dengan riset di lintas negara terkait perusahaan keluarga dan penghindaran pajak. *Cross country studies* dapat menggali secara mendalam pemahaman yang lebih luas mengenai konteks institusional terutama yang berkaitan dengan strategi perpajakan di perusahaan keluarga.

4. *Gap moderasi*: Peran Faktor tambahan yang dipakai

Minimnya penelitian terkait faktor-faktor pengaruh tambahan juga menjadi *gap* yang perlu dianalisis. Sebagian besar penelitian masih fokus pada hubungan secara langsung antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Banyak peneliti yang belum mempertimbangkan pengaruh variabel moderasi atau mediasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan keduanya. Padahal, penelitian Minnick & Noga (2010) hasilnya efektif adanya tata kelola (*corporate governance*) yang kuat dapat menetralkan pengaruh *family ownership* terhadap penghindaran pajak. Nanda & Rosid (2024) menambahkan dimensi etika bisnis yang hasilnya dapat memperlemah hubungan positif keduanya. Di sisi lain, Gaaya et al. (2017) menambahkan variabel *multiple directorships* hasilnya memperkuat adanya penghindaran pajak di perusahaan

keluarga. Variabel kualitas audit eksternal juga hasilnya memperlemah pengaruh negatif *family ownership* terhadap penghindaran pajak. Sehingga, faktor moderasi ini cukup penting sebagai penentu perusahaan keluarga apakah menghasilkan perilaku fiskal yang cukup agresif atau tidak. Secara umum, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi variabel independensi audit, kepemimpinan generasi (*founder vs descendant*), pendidikan pemilik dari keluarga, kualitas pelaporan keuangan, dsb. *Gap* struktural terkait dengan peran variabel moderasi dapat didesain peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kompleks terkait tindakan fiskal perusahaan keluarga.

5. *Gap* rentang waktu studi

Rentang waktu studi dalam beberapa penelitian terdahulu sebagian besar masih terbatas pada rentang waktu yang pendek dan hanya menggunakan data tahunan (*cross sectional*). Kondisi ini perlu adanya studi yang orientasi nya pada perilaku jangka panjang yang dinamis dalam perusahaan keluarga, karena sering terjadi perilaku yang tidak terdeteksi dalam periode waktu yang singkat. Hal ini sejalan dengan strategi fiskal perusahaan keluarga yang orientasinya lintas generasi. Penelitian Chen et al (2010), Gaaya et al. (2017), Saleh & Talkhan (2024) cenderung menggunakan data penelitian dengan rentang waktu ≤ 10 tahun serta tidak menerapkan pendekatan *time series* atau *longitudinal* yang dapat menelaah pola praktik penghindaran pajak yang berkelanjutan. Penelitian Nanda & Rosid (2024) juga hanya menggunakan data perusahaan di Indonesia dengan rentang waktu 5 tahun, sehingga masih belum banyak terekam secara menyeluruh potensi adanya fluktuasi kebijakan fiskal, perubahan kepemimpinan, serta dinamika tata kelola antar tahun. Sedangkan, Kim & Zhang (2016) menggunakan data selama rentang waktu 13 tahun, namun fokusnya lebih banyak pada struktur generasi serta tidak ada integrasi analisa lintas waktu yang berbasis pada strategi pengelolaan pajak secara eksplisit. Tidak Adanya data dengan rentang waktu jangka panjang ini menyebabkan sensitivitas yang cukup rendah terkait analisis terhadap strategi *tax planning* yang sifatnya *deferred* (tertunda), seperti pendapatan tangguhan, *transfer pricing*, ataupun adanya pergeseran kewajiban pajak ke entitas yang berada di luar negeri maupun entitas anak. Dengan kata lain, masih terdapat *temporal gap* yang perlu dijawab dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya strategis dan sistematis yang tidak hanya dianalisis dengan *snapshot* tahunan melainkan jangka panjang, misal, pendekatan *longitudinal*, *dynamic modelling*, dan data panel. Beberapa pendekatan tersebut sangat efektif untuk mengidentifikasi perilaku fiskal perusahaan keluarga yang sifatnya stabil, dapat diwariskan, dan seringkali berkaitan dengan keberlanjutan entitas antar generasi.

Perbedaan Negara Maju dan Berkembang Dalam Praktik Penghindaran Pajak

Perusahaan keluarga di negara maju dan berkembang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kelembagaan, misal di negara maju regulasi fiskal sangat ketat yang membatasi ruang atau celah bagi praktik penghindaran pajak. Sedangkan, di negara berkembang, lemahnya institusi dan adanya dominasi pemilik dapat menciptakan peluang penghindaran pajak yang sistematis dan sulit dideteksi. Dengan kata lain, di negara maju pengaruhnya negatif atau cenderung patuh pajak dan di negara berkembang pengaruhnya positif atau cenderung agresif untuk menghindari pajak. Perusahaan keluarga di negara maju umumnya lebih kepada orientasi jangka panjang dan fokus pada *going concern* lintas bisnis generasi serta reputasi keluarga. Sebaliknya, di negara berkembang perusahaan keluarga lebih memandang praktik *tax avoidance* sebagai langkah atau strategi bagi perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan keluarga dengan memanfaatkan celah regulasi fiskal dan sistem pengawasan yang lemah.

Di Negara Maju, umumnya sudah mengadopsi praktik *corporate governance* yang cukup ketat, salah satunya terkait pelibatan komisaris independen, pengawasan pihak eksternal dari pemegang saham minoritas, dan sistem pelaporan keuangan yang sudah berbasis IFRS/GAAP. Ketatnya struktur tata kelola ini membatasi ruang gerak perusahaan keluarga terutama pemilik keluarga untuk

mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan publik, salah satunya terkait regulasi pajak. Di sisi lain, keberadaan lembaga eksternal audit independen cenderung memperkuat adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, termasuk berkaitan dengan pajak. Sehingga, praktik *tax avoidance* dengan mudah bisa dideteksi yang berujung pada risiko reputasi perusahaan keluarga. Lingkungan institusional seperti otoritas fiskal yang efisien, kolaborasi internasional, dan sistem pelaporan elektronik juga mempengaruhi perusahaan keluarga untuk lebih patuh pajak dan merespons regulasi perpajakan. Perusahaan keluarga di negara maju juga lebih menyadari risiko jangka panjang terkait praktik fiskal, apalagi tindakan ini berkaitan dengan transisi generasi yang lebih terstruktur dan profesional dari sisi latar belakang pendidikan yang global dan lebih terpapar tata kelola dan standar etika internasional. Seperti hal ini penelitian Chen et al. (2010) yang menunjukkan dengan adanya sistem tata kelola yang ketat dan kultur bisnis yang lebih menghargai integritas justru lebih meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi di perusahaan keluarga. Kim & Zhang (2016) juga memaparkan hasil penelitian yang cenderung tidak agresif secara fiskal di perusahaan keluarga yang terdapat di Amerika Serikat karena mereka lebih menghindari potensi hukum yang merugikan nama baik perusahaan.

Sedangkan, di Negara Berkembang perusahaan keluarga justru lebih banyak yang menjalankan *closed governance* dengan dominasi struktur manajemen. Peran audit internal, bahkan komisaris independen seringkali hanya formalitas dan tidak punya banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan keluarga lebih leluasa untuk menyusun strategi dalam praktik penghindaran pajak, misal transaksi afiliasi yang tidak transparan dan terdapat *transfer pricing* antar perusahaan dalam 1 grup. Lemahnya sistem regulasi perpajakan juga menjadi penyebab praktik penghindaran pajak di negara berkembang cukup marak. Kurangnya integrasi data dan potensi praktik korupsi berdampak pada perusahaan keluarga yang memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan beban pajak. Selain itu, di negara berkembang transisi kepemimpinannya tidak selalu disertai dengan profesionalisme tata kelola fiskal yang meningkat. Dampaknya, *tax avoidance* di perusahaan keluarga terjadi berulang-ulang dan sistematis tanpa adanya intervensi dari pihak auditor independen atau pihak manajemen profesional lainnya. Di beberapa kasus, kepemimpinan keluarga berdampak pada tradisi bisnis keluarga dengan mewariskan strategi pajak yang agresif (Gaaya et al., 2017 ; Saleh Talkhan, 2024). Perbedaan yang mencolok antara negara maju dan berkembang inilah yang menekankan pentingnya riset lanjutan lintas negara dengan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menelaah pengaruh fiskal di perusahaan keluarga, terutama pada tingkat pengawasan, kualitas hukum pajak, serta struktur institusi yang mempengaruhinya.

Evaluasi Jenis Pengukuran *Tax Avoidance* sebagai Kekuatan Analisis

Pentingnya pengukuran yang akurat dalam *tax avoidance* menjadi tantangan tersendiri dalam penelitian. Terutama pada pemilihan jenis pengukurannya yang bukan hanya soal teknis, tapi lebih kepada penentuan kekuatan, keandalan, serta ketepatan hasil temuan penelitian. Penggunaan pengukuran yang terlalu sederhana justru tingkat kegagalan dalam mendeteksi *tax avoidance* lebih tinggi. Sedangkan, pengukuran yang terlalu teknis tanpa adanya validasi secara empiris cenderung menghasilkan temuan yang bias dan tidak dapat diinterpretasikan secara praktis. Terdapat beberapa evaluasi pengukuran *tax avoidance* dalam mengkaji hasil sintesa penelitian ini. Pertama, GAAP ETR (Chen et al., 2010; Nanda & Rosid, 2024), *Cash ETR* (Gaaya et al., 2017), yang umumnya digunakan dalam pengukuran *tax avoidance*. Kedua pengukuran ini datanya paling mudah diakses dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga mampu memberikan indikasi awal terkait beban fiskal perusahaan. Kelemahannya, pengukuran ini sangat sensitif terhadap fluktuasi akuntansi tahunan yang berpotensi munculnya distorsi akibat perbedaan temporer, misal *deferred tax*. GAAP dan *Cash ETR* juga kurang mampu mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang sifatnya lintas entitas seperti halnya adanya *tax haven* dan *transfer pricing*. Sehingga, pengukuran ini kurang memadai apabila dijadikan sebagai satu-satunya indikator *baseline* dalam penelitian *tax avoidance*.

Kedua, *Book Tax Differences* (BTD) yang mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba kena pajak dalam laporan keuangan (Saleh Talkhan, 2024). Pengukuran BTD ini lebih sensitif

dibandingkan ETR, namun diperlukan kehati-hatian. BTD mampu mendeteksi adanya manipulasi struktural, seperti halnya *shifting* laba melalui entitas afiliasi atau *timing* pengakuan pendapatan dan beban. Semakin tinggi nilai BTD, maka semakin tinggi pula strategi *tax avoidance* perusahaan. Namun, terdapat kelemahan dalam pengukuran ini yaitu bahwa tidak semua selisih itu mencerminkan *tax avoidance* karena bisa juga diakibatkan oleh perbedaan standar akuntansi dan juga regulasi. Sehingga, penggunaan BTD perlu ditambahkan variabel kontrol atau uji sensitivitas supaya hasil interpretasinya lebih valid dan akurat. Ketiga, *Tax Shelter Score* dan *Tax Long Run ETR* (Kim & Zhang, 2016). Pengukuran dengan menggunakan *tax shelter score* atau *composite tax avoidance score* dinilai lebih *robust* hasilnya dalam mendeteksi praktik *tax avoidance* yang sistematis dan juga tersembunyi, terutama pada perusahaan keluarga dengan struktur yang kompleks. Hal ini dikarenakan pengukuran *tax shelter index* diukur dengan menggabungkan beberapa indikator, misal *abnormal BTD*, *accrual based earnings management*, dan *tax haven*. Sedangkan, penelitian lain menyebutkan bahwa pengukuran *long run ETR* rata-rata menggunakan indikator GAAP ETR selama 5-10 tahun, sehingga lebih akurat dalam mendeteksi tren strategis jangka panjang penghindaran pajak (Dyrend & Maydew, 2005). Sehingga, kedua pengukuran ini dianggap lebih akurat dan sesuai dalam penelitian *tax avoidance* di perusahaan keluarga. Namun, tantangannya adalah keterbatasan data historis serta penghitungan yang cukup kompleks yang memungkinkan untuk menggunakan data panel yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kajian literatur dari 6 sintesa yang relevan dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hubungan kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak bersifat kompleks dan tidak linier. Hasilnya menunjukkan ada 3 pola utama pengaruh, yaitu positif, negatif, dan bersyarat tergantung pada faktor moderasi ataupun faktor eksternal lainnya. Di negara berkembang (Mesir, Tunisia, dan Indonesia) penghindaran pajak cenderung agresif karena dipengaruhi oleh minimnya pengawasan eksternal dan tata kelola perusahaan yang lemah. Sedangkan, di negara maju (Amerika Serikat dan Taiwan), perusahaan keluarga cenderung lebih patuh pajak karena orientasi jangka panjang dan tekanan reputasi. Teori keagenan dan *stewardship* yang digunakan sebagai pendekatan dalam hubungan perusahaan keluarga dan praktik penghindaran pajak sepenuhnya belum menjelaskan dinamika yang terjadi. Sehingga diperlukan pendekatan yang multiteoritis dengan mempertimbangkan pengaruh institusional, nilai etika, dan tekanan reputasi. Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan dalam literatur-literatur sebelumnya juga bervariasi, diantaranya GAAP ETR, *Cash ETR*, BTD, *Tax Shelter Indeks* dan *Long Run ETR*. Masing-masing pengukuran memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak di perusahaan keluarga. Secara keseluruhan, perilaku fiskal di perusahaan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang struktural (etika, kepemilikan, dan tata kelola), faktor institusional (regulasi dan negara), serta pengukuran yang digunakan dalam analisis. Sehingga, pengaruh antara *family ownership* dan *tax avoidance* sangat bergantung pada konteks dan tidak dapat digeneralisasi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

SARAN

Saran penelitian lanjutan diantaranya, peneliti selanjutnya dapat menggunakan data penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang agar lebih komprehensif di dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak di perusahaan keluarga. Peneliti juga dapat menggunakan pengukuran lebih dari 1 agar hasilnya lebih akurat. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat lagi serta lebih mendorong adanya transparansi perpajakan di perusahaan keluarga yang memiliki struktur kepemilikan yang lebih tertutup. Perusahaan keluarga juga disarankan untuk lebih menanamkan nilai etika bisnis lintas generasi dalam membangun tata kelola yang lebih baik kedepannya serta bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk peneliti di masa mendatang, agar memperluas studi penelitiannya dengan menambahkan faktor moderasi seperti generasi kepemilikan, kualitas tata kelola perusahaan, dan juga peran gender dalam manajemen keluarga. Selain itu, diperlukan juga studi komparatif antar lintas negara agar mendapatkan hasil

temuan yang lebih aplikatif dan holistik terkait bagaimana karakteristik institusi dan budaya fiskal yang mempengaruhi hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam penafsiran hasil. Pertama, jumlah artikel yang dianalisis terbatas pada 25 publikasi, yang meskipun representatif, belum cukup menggambarkan keseluruhan dinamika global, terutama dari negara-negara dengan karakter institusi yang belum banyak diteliti. Kedua, sebagian besar studi terdahulu menggunakan data *cross-sectional* dan pengukuran *tax avoidance* yang beragam, seperti GAAP ETR, *Cash ETR*, dan *BTD*, yang bisa mempengaruhi perbedaan hasil dan mengurangi konsistensi antar penelitian. Ketiga, terdapat bias geografis karena dominasi literatur dari negara tertentu, khususnya negara berkembang dan Asia Timur, sehingga membatasi generalisasi lintas budaya dan sistem hukum. Keempat, banyak studi belum mempertimbangkan faktor-faktor moderasi penting seperti etika bisnis, struktur generasi kepemilikan, kualitas audit, dan peran gender yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan keluarga dan *tax avoidance*. Terakhir, belum banyak penelitian yang menggunakan pendekatan longitudinal atau data panel jangka panjang, padahal strategi fiskal di perusahaan keluarga bersifat lintas generasi dan memerlukan pendekatan waktu yang lebih luas untuk memahami kecenderungannya secara komprehensif. Kedepannya, diperlukan studi dengan pendekatan longitudinal dan cakupan geografis yang lebih luas agar dapat memahami perilaku fiskal perusahaan keluarga secara lebih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dyreng, S., & Maydew, E. L. (2005). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gómez-Mejía, L. R., Haynes, K. T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K. J. L., & Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. *Administrative Science Quarterly*, 52(1), 106–137. <https://doi.org/10.2189/asqu.52.1.106>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Khelil, I., & Khelif, H. (2023). Tax avoidance in family firms: a literature review. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1021–1035. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0064>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Mangoting, Y., Yuliana, O. Y., Valencia, E., & Utomo, C. P. M. (2022). Ownership Structure, Tax

- Risk, and Tax Avoidance in Indonesia Manufacturing Companies 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 345. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p11>
- Meilanda, P., Adhillah, M. N., Mukhtaruddin, M., & Fuadah, L. L. (2024). Earning Management and Family Firms : Analyzing Their Impact on Tax Avoidance Through a Systematic Literature Review. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(6), 1–12.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Nanda, M., & Rosid, A. (2024). The Relationship between Family Ownership and Tax Avoidance: The Moderating Role of Business Ethical Commitment. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(2), 150–167. <https://doi.org/10.15294/jda.v16i2.2297>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Saleh, A. E. I., & Talkhan, E. M. A. (2024). The Effect of Women’s Representation in the Board of Directors on The Relationship between Ownership Structure Patterns and Tax Avoidance Practices of Non-Financial Companies Listed on the Egyptian Stock Exchange. *Alexandria Journal of Accounting*, 8(3), 133–212.
- Sritharan, N., Salawati, S., Sharon, C. C. S., & Syubaili, M. A. (2022). Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(8), 1104–1123. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14683>
- Widiastutik, R. N., Iqbal, S., & Rusydi, M. K. (2024). the Moderating Roles of Environmental, Social, and Governance Disclosures on Company Ownership Structure and Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 442–458. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.31769>